



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 24 TAHUN : 2001 SERI D NOMOR 20

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara efektif dan efisien dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum dan taraf kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, perlu kebersamaan antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif melalui satu kesamaan dalam Visi dan Misi Kota Surakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Visi dan Misi Kota Surakarta dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA

Pasal 1

Visi dan Misi Kota Surakarta dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum
- Bab III : Visi dan Misi Kota Surakarta
- Bab IV : Arah Kebijakan
- Bab V : Kaidah Pelaksanaan
- Bab VI : Kaidah Peralihan
- Bab VII : Penutup

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut Visi dan Misi Kota Surakarta, dituangkan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surakarta.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di: Surakarta
pada tanggal: 13 Desember 2001

WALIKOTA SURAKARTA

cap. ttd

SLAMET SURYANTO

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan ekonomi kepada daerah kota dan kabupaten yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi meliputi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pemberian otonomi tersebut, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah segala potensi yang dimiliki perlu lebih diberdayakan dan diintegrasikan ke dalam suatu konsepsi kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan tanpa mengabaikan akan budaya masyarakat serta memiliki kemampuan komperatif dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan tersebut perlu menetapkan Visi dan Misi Kota Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

-----o0o-----

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 2001
TANGGAL : 13 DESEMBER 2001

VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan otonomi daerah seperti diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan kesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat.

Implementasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/1998 telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pengundangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/1998, bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemeliharaan hubungan yang serráis antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemberian otonomi kepada daerah.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah di Kota Surakarta, perlu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah yang dapat mensinergikan tiga pilar utama yaitu : masyarakat, legislatif, dan eksekutif melalui kesatuan Visi dan Misi Kota Surakarta.

Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Kota Surakarta hendaknya mendasarkan pada potensi dan kemampuan daerah dengan menerapkan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Menyadari adanya keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Surakarta, maka pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan Visi dan Misi Kota, sebagai salah satu daya dukung mewajibkan perlunya pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi

dan seni, memperhatikan tantangan global, serta pemahaman terhadap segala potensi Kota yang memiliki daya saing tinggi, terutama peningkatan sumber daya manusia menuju masyarakat madani.

Bertitik tolak pada dasar pemikiran itulah, disusun Visi dan Misi Kota yang merupakan dasar bagi penetapan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Surakarta.

B. Pengertian

Visi dan Misi Kota adalah keinginan fundamental yang hendak dicapai beserta prinsip-prinsip pelaksanaan secara terpadu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat kota, dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Visi dan Misi Kota Surakarta ditetapkan dengan maksud sebagai arah penyelenggaraan pembangunan Kota Surakarta dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia dan menegakkan supremasi hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

D. Landasan

Visi dan Misi Kota Surakarta disusun dengan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, landasan operasional Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dengan tetap berpedoman pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/1998.

E. Sistematika

Naskah Visi dan Misi Kota Surakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI UMUM
BAB III	: VISI DAN MISI KOTA
BAB IV	: ARAH KEBIJAKAN
BAB V	: KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI	: KAIDAH PERALIHAN
BAB VII	: PENUTUP

BAB II

KONDISI UMUM

Kota Surakarta dengan luas wilayah 4.04 km² terletak di antara 110° 45' 15" - 110° 45' 35" Bujur Timur, 70° 36' - 70° 56' Lintang Selatan merupakan daerah yang berbatasan dengan daerah hinterland (daerah penyangga) yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Daerah-daerah tersebut terletak dalam wilayah kesatuan budaya "Wong Sala" dan kesatuan wilayah geografis Surakarta yang disebut "SUBOSUKOWONOSRATEN".

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada akhir tahun 2000 mencapai 550.251 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 12.494 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata di bawah 1,0% per tahun.

Tingkat pendidikan kelompok penduduk didominasi pendidikan SD 107.525 orang, SMTP 96.267 orang, SMTA 87.376 orang, sedangkan kelompok yang berpendidikan Akademi/Perguruan Tinggi tercatat sebesar 25.481 orang.

Mata pencaharian penduduk angkatan kerja, terdiri dari : buruh sendiri 0,09%, buruh tani 0,02%, pengusaha 1,70%, buruh industri 18,28%, buruh bangunan 15,96%, pedagang 5,80%, jasa angkutan 4,17%, PNS/ABRI 4,48%, pensionan 4,27%, dan lain-lain 43,23% (Sumber : BPS Kota Surakarta).

Kota Surakarta memiliki keterbatasan potensi sumber daya alam dan wilayah, namun memiliki keunggulan peninggalan budaya yang potensial secara ekonomis, dan potensial lainnya yang dapat dikembangkan dan berdaya saing tinggi, di bidang jasa, perdagangan, pendidikan, budaya dan pariwisata bagi daerah hinterland (daerah penyangga) dan sekitarnya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kota Surakarta saat ini dan masa datang timbul antara lain akibat adanya keterbatasan potensi sumber daya alam dan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta akibat factor kendala eksternal dan internal.

Faktor-faktor kendala eksternal yang dapat menimbulkan permasalahan Kota Surakarta antara lain adalah arus dan tantangan globalisasi sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan tour and travel, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, tuntutan demokratisasi, dan perlindungan terhadap Hak Karya Intelektual, serta akan diberlakukannya pasa bebas baik AFTA maupun NAFTA.

Faktor-faktor kendala internal yang dapat menimbulkan permasalahan Kota Surakarta antara lain adalah adanya percepatan pertumbuhan angkatan kerja yang belum dapat diimbangi dengan perluasan lapangan kerja dan / atau kesempatan berusaha, tingginya arus urbanisasi yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan masyarakat, serta masih

rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk. Di pihak lain, kondisi ketertiban masyarakat pada saat ini yang kurang kondusif bersamaan dengan melemahnya law enforcement di masyarakat akibat dari terhembusnya semangat kebebasan, Hak Asasi Manusia dan demokrasi

Atas dasar kondisi di atas, maka pembangunan Kota Surakarta seharusnya mampu mengarahkan warganya menuju ke jenjang masyarakat berstrata budaya yang Sian mengantisipasi perubahan jaman, dan tetap dilandasi oleh cerminan dari perilaku kehidupan beragama dan tatanan masyarakat yang ber ke-Tuhanana Yang Maha Esa.

BAB III

VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA

A. VISI

Visi Kota adalah "Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga".

Adapun yang dimaksud Sala sebagai Kota Budaya, yaitu kota yang pengembangannya berwawasan budaya dalam arti luas, yang seluruh komponen masyarakatnya dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Kota Surakarta di masa depan, ditetapkan Misi Sebagai berikut :

1. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai "Sala Kota Budaya".
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integritas masyarakat madani yang berlandaskan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.

4. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI UMUM

Strategi dijabarkan dalam kebijakan yang menjelaskan respon suatu komunitas stakeholder (elemen masyarakat) Kota terhadap isu-isu penting dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi. Strategi yang efektif akan mendapatkan keuntungan dari kekuatan dan peluang serta meminimumkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman.

Dengan memahami dan mencermati faktor-faktor internal kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi Kota Surakarta maka arah kebijakan atau strategi pembangunan Kota Surakarta dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya dengan citra budaya Kota Surakarta sebagai aset wisata, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal, serta asertif terhadap kunjungan wisata.
2. Optimalisasi peran strategis Kota Surakarta sebagai pusat pelayanan dan pusat industri jasa bagi daerah sekitarnya dengan memanfaatkan akses ke tiga kutub pertumbuhan, yaitu Jogjakarta, Semarang dan Surabaya sebagai jalur perdagangan dan ekspor – impor.
3. Membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain termasuk pihak swasta maupun masyarakat.
4. Revitalisasi ekonomi masyarakat di segala bidang dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang usaha, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Membuka peluang bagi pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan, sehingga mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan cinta terhadap kotanya.
6. Meningkatkan profesionalitas para aparat penegak hukum dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

7. Meningkatkan pelayanan publik dengan prinsip memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu secara fisik, ekonomi dan politik untuk mendapatkan pelayanan prima yaitu cepat, tepat, mudah serta murah.

Arah kebijakan atau strategi pembangunan ini harus menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh stakeholder (elemen masyarakat) kota dalam keikutsertaannya menjalankan pembangunan kota sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Keberhasilan dalam menjabarkan strategi ini sangat tergantung pada penyusunan perumusan kebijakan dan program yang mengiringinya, serta prioritas pelaksanaannya.

B. STRATEGI KHUSUS

1. Bidang

a. Sosial Budaya

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengutamakan pencegahan melalui perbaikan gizi anak, jaminan kesehatan, jaminan sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan sosial, anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat dan seluruh penyakit sosial lainnya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya daerah, sebagai jati diri Wong Sala.

Memberantas secara sistematis segala bentuk penyakit masyarakat dan jalur perdagangan NAPZA dalam rangka mewujudkan iklim kondusif bagi pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas dan dinamis.

Memantapkan kebudayaan daerah dengan peran serta Keraton Surakarta Hadiningrat dan Puro Mangkunegaran, termasuk penggunaan identitas kebudayaan daerah serta taman rekreasi yang telah dimiliki sebagai wahana pengembangan kepariwisataan daerah.

Mewujudkan iklim yang kondusif bagi generasi muda agar dapat secara bebas dan bertanggung jawab mengaktualisasikan potensi bakat dan minat yang dimiliki termasuk berprestasi dan berkreativitas di bidang olah raga dan seni, dalam rangka mengembangkan sportifitas.

b. Hukum

Mewujudkan Peraturan-peraturan Daerah yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan kota yang transparan, akuntabel, tertib, menjamin kepastian hukum, menguatkan perekonomian yang berbasis pada perdagangan, jasa, industri pariwisata, industri rumah tangga, industri kerajinan dan agro industri.

Memantapkan budaya dan kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan kualitas profesionalisme dan integritas moral para aparat penegak hukum khususnya, dan penyelenggara pemerintahan kota pada umumnya.

c. Ekonomi

Memberdayakan ekonomi rakyat dengan menghidupkan dan meningkatkan peran pengusaha kecil, menengah dan koperasi di bidang industri jasa, pariwisata, home industri, kerajinan dan agro industri terutama yang berpeluang ekspor agar lebih efisien, berdaya saing berdasarkan keunggulan komparatif, termasuk pengembangan pasar produk dan pusat pelayanan bagi daerah hinterland (daerah penyangga).

Menerapkan efisien dan transparansi anggaran serta profesionalitas pengelolaan badan usaha milik daerah termasuk dengan memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam suatu kemitraan yang saling menguntungkan.

d. Politik

Meningkatkan dan memantapkan pemahaman kesadaran berpolitik dan budaya politik yang demokratis dan bertanggungjawab pada tatanan kehidupan bermasyarakat di semua lapisan termasuk para penyelenggara pemerintahan kota, dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum dalam rangka pelibatan peran aktif masyarakat di semua aspek kehidupan.

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas perwujudan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan publik.

e. Aparatur Pemerintah Kota

Mewujudkan aparatur pemerintah kota yang cerdas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kemampuan profesional dan kredibilitas dalam melaksanakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mewujudkan pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

f. Komunikasi dan Media Masa

Meningkatkan peran komunikasi melalui media masa daerah untuk menyebarluaskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan dan aspirasi masyarakat Kota Surakarta dalam rangka pertanggungjawaban publik.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan terhadap media dalam rangka mencegah penyalahgunaan kebebasan pers dan meningkatkan kualitas pers daerah.

g. Agama

Meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga-lembaga keagamaan dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif perubahan di segala aspek kehidupan, sebagai konsekuensi era globalisasi serta meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beribadah serta membina kerukunan hidup beragama.

h. Pendidikan

Meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah guna mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah di segala bidang.

Meningkatkan peran lembaga pendidikan termasuk yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan formal, dan pendidikan luar sekolah guna memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kerukunan, toleransi dan menumbuhkan rasa cinta pada kebudayaan daerah.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat termasuk lembaga-lembaga pendidikan non formal yang strategis.

i. Lingkungan Hidup

Mewujudkan tata ruang yang bebas polusi, penguasaan/pemanfaatan tanah dan sumber air tanah guna mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta fasilitas publik yang memadai.

j. Ketertiban Masyarakat

Memberdayakan potensi masyarakat sebagai komponen pendukung utama dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan tentram, serta rasa ikut memiliki (rumongso melu handarbeni).

k. Sumber Dana

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan manajemen Pemerintahan Kota.

2. Pelaksanaan

Aktualisasi arah kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tiap tahun anggaran yang direncanakan oleh Pemerintahan Kota Surakarta dengan memberi prioritas dalam mengalokasikan anggaran terhadap program-program yang mencerminkan kebutuhan yang bernilai strategis dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi Kota Surakarta beserta standar kinerjanya.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Visi dan Misi Kota yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD bersama Walikota Surakarta harus menjadi tujuan serta petunjuk arah dan pedoman penyelenggaraan Pembangunan Kota Surakarta, oleh sebab itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Walikota selaku Kepala Daerah berkewajiban untuk melaksanakan Visi Misi Kota Surakarta sesuai dengan Tugas dan Wewenang sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menggerakkan segala potensi yang ada dalam masyarakat, serta memberikan pelayanan dalam pelaksanaannya.
2. DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib berpedoman pada Visi dan Misi Kota Surakarta.
3. Nilai-nilai strategis yang menjadi dasar pelaksanaan Visi dan Misi Kota adalah keimanan dan ketaqwaan, keadilan, kejujuran, tata krama, toleransi, efisien, kerja keras dan rasa ikut rumongso melu handarbeni / memiliki kota.
4. Visi dan Misi Kota Surakarta sejak tanggal ditetapkan, dan oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Surakarta dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan program-program pelaksanaannya beserta standar kinerja, dan menuangkannya dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya akan dibahas dan disahkan sebagai Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD Kota Surakarta.

BAB VI
Kaidah Peralihan

Rencana strategi dan program pelaksanaan yang telah dibuat dan tidak bertentangan dengan Visi Misi ini dapat dilanjutkan.

BAB VII
Penutup

Bahwa berhasilnya pelaksanaan Visi dan Misi Kota Surakarta tidak terlepas dari peran serikat para stakeholders (elemen masyarakat) termasuk partisipasi dan/atau pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat, kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, serta semangat, tekad, disiplin, kesadaran dan kinerja para penyelenggara Pemerintahan Kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA

cap. ttd

SLAMET SURYANTO

PENJELASAN

VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA

PENDAHULUAN

Visi dan Misi Kota Surakarta disusun dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pembangunan Kota Surakarta bagi seluruh stakeholder yang terdiri dari masyarakat, legislatif dan eksekutif.

Penyusunan Visi dan Misi Kota merupakan konsekuensi logis dari adanya Tap MPR No. XV/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Naskah Visi dan Misi Kota Surakarta terdiri dari Pendahuluan, Kondisi Umum, Visi dan Misi Kota, Arah Kebijakan, Kaidah Pelaksanaan dan Penutup, merupakan hasil akhir dari proses pembahasan yang panjang mulai dari analisis terhadap kondisi umum dengan memakai analisis SWOT, kondisi saat ini, dan kondisi ideal yang diharapkan.

Agar naskah Visi dan Misi Kota Surakarta dapat dimengerti, maka dibuatlah naskah penjelasan Visi dan Misi Kota Surakarta.

A. ANALISIS SWOT

Dengan memahami kondisi kota, dilakukan analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, tantangan dan kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya dari hasil analisis, ditentukan sasaran yang hendak diraih, sehingga dengan demikian tujuan utama dapat dicapai.

a. Keunggulan Kota Surakarta

- Kota budaya yang memiliki situs-situs, cagar budaya dan ritual-ritual budaya yang unik, termasuk Keraton Surakarta serta Pura Mangkunegaran.
- Memiliki industri kerajinan tradisional dan pasar agrobisnis yang berprospek domestik maupun ekspor baik bagi Kota Surakarta maupun daerah sekitarnya.
- Letak kota secara geografis di simpul transportasi utama angkutan darat provinsi di Pulau Jawa, serta memiliki bandar udara internasional dan terminal peti kemas.
- Kondisi tanah yang relatif stabil, sehingga menjamin kelestarian baik bangunan-bangunan yang ada, maupun yang akan dibangun.
- Memiliki sumber daya manusia yang handal dalam bidang industri dan perdagangan.
- Kota Surakarta adalah leading city bagi daerah sekitarnya.

b. Kelemahan yang ada

- Masyarakat Kota Solo adalah masyarakat yang plural baik dari segi etnis, agama, maupun dari segi politis, sehingga dapat memiliki potensi konflik.
- Masih maraknya kriminalitas. Kurangnya keamanan dan ketertiban akan berdampak kurang bergairahnya investor yang membutuhkan keamanan dan ketenangan dalam menanamkan modalnya.
- Dirasakan kurangnya implementasi supremasi hukum baik oleh aparatur penyelenggara pemerintahan daerah, aparatur penegak hukum maupun oleh masyarakat sendiri.
- Kecenderungan perkembangan internal walaupun di sisi ekonomi sektor informal dapat memberikan peningkatan kontribusi income daerah, tersedianya berbagai fasilitas dan kesempatan berusaha serta bekerja, baik di sektor formal maupun informal, cenderung meningkatkan mobilitas sosial dan juga berdampak kehidupan kota semakin tidak nyaman, terutama dengan adanya kekumuhan pemukiman, pendapatan transportasi, serta adanya gangguan keamanan dan ketertiban.

c. Kesempatan yang ada

Masih adanya kesempatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan kota yang meliputi peningkatan kebudayaan, pendidikan, olahraga, perdagangan dan pariwisata.

- Kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan dalam pembangunan kota sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah. Peluang kemitraan meliputi kemitraan antar daerah, kemitraan dengan swasta dan kemitraan dengan masyarakat.
- Mobilisasi dana melalui investasi swasta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan perkotaan.
- Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

d. Ancaman yang ada

- Masih kurangnya pengertian akan konsep wawasan kota dan ketahanan kota sehingga dapat dilaksanakan pembangunan yang berkesinambungan.
- Terjadinya kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat yang merupakan faktor utama terjadinya konflik sosial.
- Besarnya angka pengangguran dan setengah pengangguran serta kelompok frustrasi yang merasa tidak diuntungkan dalam proses pembangunan merupakan tantangan sosial bagi keberlanjutan pembangunan kota.
- Rendahnya ketertiban umum sebagai akibat ledakan kebebasan euphoria politik menimbulkan dampak berupa pelanggaran keamanan dan ketertiban.

- Tingginya arus urbanisasi (migrasi sirkuler) ke Kota Surakarta merupakan tantangan bagi Kota Surakarta untuk mengendalikan tataguna lahan dan dampak lingkungan, serta menyediakan pelayanan umum yang memadai.
- Persaingan daerah sekitarnya. Tumbuhnya pusat-pusat pengembangan sarana perekonomian, industri, dan pemukiman pada daerah hinterland berpengaruh pada dinamika kota. Pengaruh positif tumbuhnya daerah sekitar akan mengurangi laju urbanisasi ke kota artinya berkembangnya daerah sekitar akan mengurangi beban kota serta mengurangi angka kemiskinan dan kekumuhan kota. Namun hal lain yang menjadi ancaman adalah timbulnya daya tarik warga kota pergi keluar kota guna membelanjakan atau menginvestasikan pendapatannya, sehingga mengurangi income kota.

B. ANALISIS ISSUE STRATEGIS

Analisis issue strategis merupakan interaksi antara beberapa faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Interaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Interaksi Kekuatan – Peluang

Dengan implikasi sebagai upaya mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada.

- Optimasi citra budaya Kota Surakarta sebagai aset wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan menciptakan kerajinan tradisional penunjang pariwisata dengan memanfaatkan peluang kemitraan antar daerah, maupun dengan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan wisata.
- Optimasi peran kota sebagai pusat pelayanan industri dan perdagangan bagi daerah produsen di sekitarnya dengan memanfaatkan akses ke tiga kota kutub pertumbuhan yaitu : Jogja, Semarang dan Surabaya sebagai jalur pemasaran ekspor.

b. Interaksi Kekuatan – Ancaman

Dengan implikasi menghadapi tantangan dengan mengoptimalkan potensi yang ada.

Upaya mengatasi tantangan pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan sosial serta penyediaan pelayanan umum dengan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan dalam penyediaan lapangan kerja.

c. Interaksi Kelemahan – Peluang

Dengan implikasi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Upaya mengatasi kelemahan berupa tingginya angka kriminalitas dan rendahnya penegakan hukum dengan meningkatkan kewibawaan aparat penegak hukum dan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses

pembangunan sehingga mendorong tumbuhnya rasa memiliki bagi kotanya.

d. Interaksi Kelemahan – Ancaman

Dengan implikasi meminimalkan dampak negatif dengan mengatasi kelemahan.

- Meningkatkan pelayanan publik untuk mencegah ketidakadilan dan keresahan sosial.
- Meningkatkan ketertiban umum dengan supremasi hukum.

Interaksi Kekuatan – Tantangan merupakan sasaran agar kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai, sedangkan interaksi Kekuatan – Ancaman, Kelemahan – Peluang, serta Ancaman – Kelemahan merupakan issue strategis dalam pelaksanaan misi.

C. KONDISI SAAT INI

Kondisi Kota Surakarta saat ini ditinjau dari aspek-aspek :

1. Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Masyarakat Sala adalah masyarakat plural yang religius, dengan tempat-tempat peribadatan yang cukup banyak, tersebar di seluruh penjuru kota. Perlu ditingkatkan pengalaman ajaran-ajaran agama serta toleransi antar umat, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mendukung konsep Bhinneka Tunggal Ika.

2. Sosial

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Surakarta terus bertambah, dari tahun 1996 sampai tahun 2000, jumlah penduduk berturut-turut dari : 536.005 (1996), 539.387 (1997), 542.832 (1998), 546.469 (1999), dan pada akhir tahun 2000 mencapai 550.251 jiwa.

Dari lima wilayah kecamatan yang ada, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarsari yang pada tahun 2000 mencapai 161.769 jiwa. Kepadatan penduduk berdasarkan data yang ada pada tahun 1996-2000 mencapai 12.494 jiwa/km², jumlah kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Serengan (19.344 jiwa/km²), dan angka terendah kepadatan penduduk terdapat di Kecamatan Jebres (10.790 jiwa/km² pada tahun 2000).

Adapun struktur kependudukan Kota Surakarta berdasarkan kelompok umum berbentuk seperti piramida yaitu :

- Kelompok umur di atas 60 tahun menempati jumlah terkecil yaitu pada tahun 2000 mencapai 29.849 jiwa.
- Kelompok umur 0-4 tahun menempati jumlah terbanyak yaitu pada tahun 2000 sebanyak 80.471 jiwa.

Jumlah angkatan kerja di Kota Sala cukup besar, walaupun disertai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan, komposisi penduduk Kota Sala menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan dasar yaitu, penduduk tamat SD mencapai jumlah 107.525 orang.

Kemudian diikuti penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 96.267 orang dan SLTA 87.376 pada tahun 2000, sedangkan penduduk dengan pendidikan tingkat Akademi/Perguruan Tinggi hanya mencapai 25.481 orang pada tahun yang sama.

Masalah pengangguran, setelah pengangguran serta partisipasi yang rendah, ternyata cukup tinggi. Sejumlah 60% dari angkatan kerja ternyata tidak ikut bekerja aktif. Mereka terdiri dari ibu rumah tangga, murid sekolah, dan pensiunan. Namun yang harus diwaspadai adalah kelompok frustrasi, kelompok ini adalah kelompok angkatan kerja yang tidak tercatat sebagai pengangguran terbuka, karena tidak berusaha mencari pekerjaan.

3. Politik

Nuansa baru dalam perkembangan dinamika politik di tanah air adalah jatuhnya Orde Baru pada pertengahan Mei 1998. Pemerintahan yang sentralistik pada masa Orde Baru mengakibatkan macetnya kehidupan berdemokrasi yang sesungguhnya. Terbelenggunya penyampaian aspirasi dirasakan sampai ke tingkat bawah. Sistem sentralistik ini tidak sesuai dengan makna serta jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka desakan perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokrasi.

Ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada hakekatnya memberikan kewenangan otonomi yang luas, nyata serta tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar tidak selalu tergantung pada kebijaksanaan pemerintah pusat. Menindaklanjuti kewenangan yang ada pada daerah tersebut, pemerintah daerah perlu mulai mengadakan perubahan dan penyempurnaan kelembagaan daerah serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sendiri.

Demikian pula kehidupan berdemokrasi dalam Orde Reformasi ini juga dirasakan sampai di masyarakat. Tumbuhnya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, melahirkan semangat berpartisipasi yang lebih tinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di daerah. Masyarakat sebagai elemen utama demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merasa diakui keberadaannya, dengan kata lain "diuwongke".

4. Kebudayaan

Kota Surakarta juga memiliki potensi yang dapat mendukung terwujudnya karakteristik Kota Surakarta agar berkemampuan kompetitif di tengah arus globalisasi dan era otonomi daerah, sekaligus dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin, yaitu :

- Sejarah Kota Surakarta sebagai Ibukota Kerajaan Mataram, dengan segala khasanah budayanya dan sebagai kota dagang yang memiliki akses baik regional maupun internasional, serta kota awal timbulnya pergerakan nasional.

- Kota Surakarta adalah tempat kelahiran pujangga dan seniman besar, diantaranya KRT Ronggowarsio, KRT Yosodipuro serta Raden Saleh.
- Semangat mencintai, melestarikan serta mengembangkan budaya daerah yang ada di kalangan masyarakat.

5. Ekonomi

Peran Kota Surakarta sebagai kota jasa terlihat dari peran sektor jasa yang mencapai 80%. Pada sektor jasa, selain pada perdagangan skala kecil yang menonjol adalah jasa publik, khususnya pendidikan, pelatihan dan pekerja sosial. Hal tersebut sebenarnya menunjukkan ketergantungan Kota Surakarta untuk tetap menjadi pusat dalam melayani kebutuhan jasa dan barang industri dari kota dan daerah sekitarnya.

Lapangan usaha industri pengolahan tercatat 20,6%. Angkatan kerja merupakan lapangan Regional Bruto/PDRB kota. Industri yang menonjol adalah industri sandang meliputi setengah dari industri yang ada. Disusul industri pengolahan makanan 25% dan kemudian industri kertas percetakan 15%. Melihat dominannya sektor perdagangan dan industri sebagai aktifitas masyarakat bawah, maka sasaran strategis pengembangan kota hendaknya dapat memperhatikan hajat semua lapisan masyarakat.

Pada sisi lain, perkembangan perekonomian nasional yang ditandai dengan tidak menentunya fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi perekonomian daerah. Lebih dari itu, diharapkan pada era persaingan pasar bebas (AFTA/NAFTA), harus dapat diubah ancaman yang ada menjadi peluang yang menguntungkan.

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi sangat berpengaruh dalam perkembangan budaya. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan perilaku dan sikap konsumtif masyarakat, serta kecenderungan luar negeri minded.

6. Keamanan dan Ketertiban

Sebagai indikator keamanan dan ketertiban di Kota Sala adalah banyaknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi, termasuk diantaranya masih maraknya pencurian, perampokan, perjudian, pelacuran, serta kasus-kasus narkoba yang masih tersendat-sendat penyelesaiannya.

D. KONDISI IDEAL YANG DIHARAPKAN

Kondisi ideal adalah kondisi Kota Surakarta seperti yang dicita-citakan atau diharapkan, yang merupakan tujuan utama pembangunan kota. Visi Kota Surakarta pada dasarnya adalah suatu pernyataan luhur yang mencerminkan pemahaman akan kondisi kota pada saat ini serta kondisi ideal yang diharapkan. Kondisi ideal merupakan gambaran keinginan konseptual yang hendak dicapai oleh bukan saja warga masyarakat, tetapi juga oleh stakeholder Kota Surakarta dalam menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Kondisi ideal ini juga meliputi Kota Sala sebagai

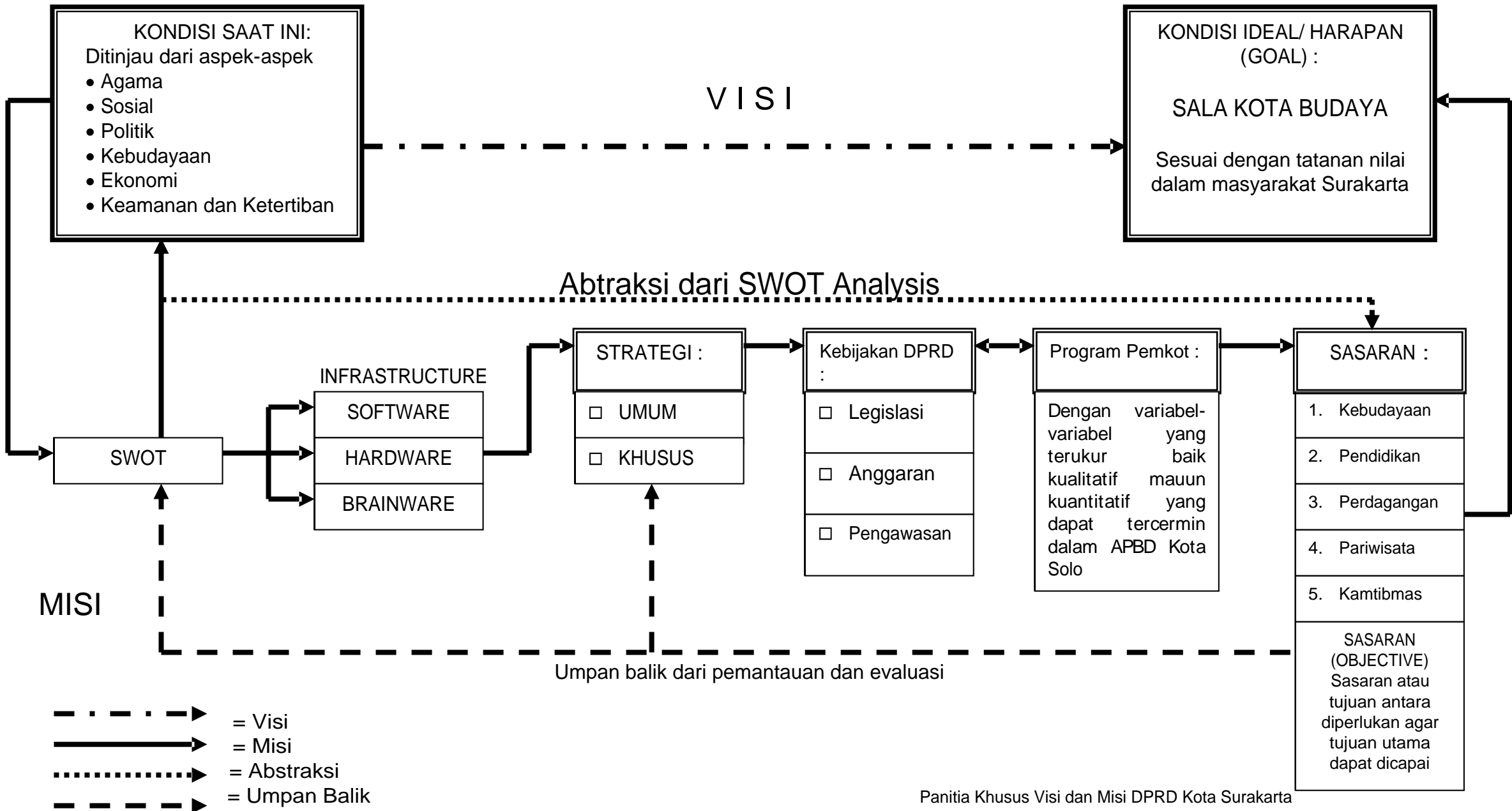
kota modern. Modern bukan dalam arti westernness. Modern dalam arti comfortable, nyaman bagi stakeholders.

Konsepsi Sala Kota Budaya adalah kondisi ideal yang diharapkan yang sesuai dengan tatanan nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Surakarta, yaitu terwujudnya Kota Sala yang berbudaya lahir dan batin. Kondisi ideal ini tentunya tidak terlepas dari cita-cita nasional Bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

MATRIKS ANALISIS SWOT KOTA SURAKARTA

<p>ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL</p> <p>ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki situs cagar budaya dan ritual budaya yang unik - Industri kerajinan tradisional - Letak geografis di simpul transportasi pusat pertumbuhan utama - Kondisi lahan stabil - SDM yang handal di bidang industri dan perdagangan 	<p>KELEMAHAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat plural - Tingginya kriminalitas (rendahnya keamanan dan ketertiban) - Rendahnya supremasi hukum - Pemukiman yang kumuh serta kepadatan arus transportasi
<p>PELUANG :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan daerah yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri - Kemitraan yang produktif antara daerah, dengan swasta dan masyarakat - Monolitas dana melalui partisipasi masyarakat dan investasi swasta - Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	<p>KEKUATAN - PELUANG :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimal citra budaya Kota Surakarta sebagai aset wisata yang didukung oleh SDM dan kerajinan tradisional dengan memanfaatkan peluang kemitraan dengan masyarakat - Optimasi peran kota sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya dengan memanfaatkan akses ketiga kutub pertumbuhan utama (Jogya, Semarang, Surabaya) 	<p>PELUANG-KELEMAHAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengatasi tingginya angka kriminalitas dan rendahnya penegakan hukum dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum dan proses pembangunan sehingga merangsang tumbuhnya rasa memiliki terhadap kotanya - Tingkatkan kualitas SDM, membuka peluang berpartisipasi dan supremasi hukum untk melaksanakan otonomi daerah
<p>ANCAMAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pengertian akan konsep wawasan kota dan ketahanan kota - Kesenjangan sosial dan konflik sosial - Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan - Rendahnya ketertiban umum - Tingginya arus urbanisasi (Migrasi sirkuler) sehingga perlu penyediaan pelayanan yang memadai 	<p>KEKUATAN – ANCAMAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan sosial dan peningkatan pelayanan umum dengan mengoptimalkan peran industri kecil dalam penyediaan lapangan kerja 	<p>ANCAMAN – KELEMAHAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkatkan pelayanan publik untuk mencegah ketidakadilan dan keresahan - Tingkatkan ketertiban umum dengan supremasi hukum

BAGAN KONSEPTUAL VISI MISI KOTA SOLO



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.